

STRATEGI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BONUS DEMOGAFI (STUDI KASUS DI KOTA TEGAL)

Agus Bahrudin

**FISIP UNTAG SEMARANG Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah,
Indonesia, email; agusblitbang@yahoo.co.id**

Abstract

The Indonesian state has begun to enter a golden period in the form of a demographic bonus era which needs to be followed up through a series of policy actions that are able to bring optimal benefits. From the results of the projected population of Tegal City, the demographic bonus will be in 2020 with a dependency ratio of 50.42%. And in 2021 with a dependency ratio of 52.06%.

Policies and programs are carried out through quality education, the Generation Planned Program, population education to change people's mindsets and increase awareness of population issues, as well as skills education as a pathway to improve the quality of superior and ready to work human resources.

Employment policies are managed through workforce empowerment by training entrepreneurs, accessing capital and training for MSMEs. Development of local local informal sector businesses, such as the development of handicraft businesses and MSMEs in the City of Tegal

Keywords: strategy, policy, bonus, demographics, study, case

Abstrak

Negara Indonesia mulai memasuki suatu masa emas berupa era bonus demografi yang mana perlu ditindaklanjuti melalui serangkaian aksi-aksi kebijakan yang mampu membawa manfaat yang optimal. Dari hasil proyeksi jumlah penduduk Kota Tegal bonus demografi berada pada tahun 2020 dengan rasio ketergantungan sebesar 50.42 % dan tahun 2021 dengan rasio ketergantungan sebesar 52.06 %.

Kebijakan dan program yang dilakukan melalui pendidikan berkualitas, Program Generasi Berencana, pendidikan kependudukan untuk mengubah pola pikir masyarakat dan meningkatnya kesadaran mengenai isu kependudukan, serta pendidikan keterampilan sebagai jalur meningkatkan kualitas SDM unggul dan siap bekerja.

Kebijakan ketenagakerjaan dikelola melalui pemberdayaan tenaga kerja dengan melatih wirausaha, akses permodalan dan pelatihan UMKM. Pengembangan usaha sektor informal lokal daerah, seperti pengembangan usaha-usaha kerajinan dan UMKM di Kota Tegal

Kata Kunci : strategi, kebijakan, bonus, demografi, studi, kasus

policy) adalah public policy will be defined as a course of action or inaction chosen by public authorities to address a given problem or interrelated set problems . Sedangkan menurut George C. Edwards III (2003: 10) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan”. Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008:185) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan “segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah”. Dengan demikian kebijakan publik pada intinya meliputi tujuan, nilai-nilai, dan praktik. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka kebijakan publik memiliki konsep-konsep sebagai berikut : 1. Kebijakan publik berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik/ pelaksanaannya. 2. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta. 3. Kebijakan publik tersebut menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah Berdasarkan penjelasan di atas, maka suatu kebijakan publik memuat 3 (tiga) elemen, yakni: 1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai 2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 3. Penyediaan input yang memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi kebijakan

Bonus demografi (*dividend demographic*) adalah suatu keadaan dimana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan

jumlah penduduk usia non produktif, artinya bahwa potensi beban ketergantungan penduduk akan berkurang apabila kelebihan dari potensi bonus demografi dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan sebaliknya akan menjadi ancaman sosial jika tidak dipersiapkan dengan baik. *dividend demographic* merupakan salah satu perubahan dinamika demografi yang terjadi karena adanya perubahan struktur penduduk menurut umur. Fenomena transisi demografi ini disebabkan karena berkurangnya angka kelahiran yang dibarengi oleh tingginya angka kematian dalam jangka panjang. Pada saat terjadi penurunan angka kelahiran dalam jangka panjang, maka berdampak pada pengurangan jumlah penduduk berusia muda (< 15 tahun), akan tetapi di satu sisi jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) akan meningkat secara drastis sebagai akibat angka kelahiran yang tinggi di masa lalu. Disisi lain jumlah penduduk dengan umur di atas 64 tahun akan meningkat secara perlahan dan kemudian meningkat cepat akibat terjadinya peningkatan usia harapan hidup. Pada saat jumlah penduduk usia produktif jauh melebihi jumlah penduduk usia non-produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas) ini yang disebut dengan kondisi Bonus Demografi (Rusli, Toersilansih, Meirida, Kurniawan, & Setiawan, 2015).

Parameter yang digunakan dalam menilai fenomena *dividend demographic* adalah Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) yang merupakan rasio yang menggambarkan

perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (kurang dari 15 tahun dan diatas 64 tahun) dan penduduk usia produktif (15 –64 tahun). Angka Rasio Ketergantungan ini menunjukkan beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Pada saat angka rasio ketergantungan rendah, kondisi ini memperlihatkan bahwa penduduk usia produktif hanya menanggung sedikit penduduk usia non produktif

Angka rasio ketergantungan yang rendah akan berimplikasi pada perekonomian negara yang dapat dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk meningkatkan produktifitas sebuah negara. Kondisi ini dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya manusia yang produktif yang akan mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan tabungan mereka yang pada akhirnya dapat dimobilisasi menjadi investasi' (Maryati, 2015). Idealnya pertumbuhan ekonomi secara maksimal akan terjadi pada saat Rasio Ketergantungan berada di bawah angka 50. Kondisi ini juga disebut sebagai the window of opportunity (jendela kesempatan).

Berbagai literatur menyatakan proyeksi penduduk sebagai prediksi atau ramalan yang didasarkan pada asumsi rasional tertentu yang dibangun untuk kecenderungan masa yang akan datang dengan menggunakan peralatan statistik atau perhitungan matematik. Di sisi lain, peramalan penduduk (population forecast) bisa

saja dengan/tanpa asumsi dan atau kalkulasi tanpa kondisi, syarat dan pendekatan tertentu (Smith, et.al 2001). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peramalan adalah proyeksi, tetapi tidak semua proyeksi membutuhkan peramalan (forecast). Peramalan penduduk adalah perhitungan kondisi masa depan yang mungkin terjadi dengan menggunakan beberapa asumsi, seperti bila angka kelahiran, kematian, dan migrasi saat ini tidak berubah. Adapun manfaat proyeksi penduduk, adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui keadaan penduduk pada masa sekarang yaitu berkaitan dengan penentuan kebijakan kependudukan serta perbandingan tingkat pelayanan saat ini dengan tingkat pelayanan yang ideal yang diterima penduduk
2. Mengetahui dinamika dan karakteristik penduduk di masa mendatang, yaitu berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana
3. Mengetahui pengaruh berbagai event terhadap keadaan penduduk di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang

Adapun metode yang dapat digunakan untuk memproyeksikan penduduk bermacam-macam, dimana masing-masing metode memiliki asumsi serta kelebihan dan kelemahan masing-masing. Oleh karena itu dalam memilih metode yang akan digunakan untuk proyeksi penduduk perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain cakupan wilayah studi dan wilayah perencanaan, dinamika perkembangan wilayah,

jangka waktu proyeksi, presisi dan tujuan penggunaan, ketersediaan data. Adapun metode-metode yang dapat digunakan untuk memproyeksikan penduduk adalah sebagai berikut :

1. Model Aritmatik. Menurut Klosterman (1990) “model linear Aritmatik adalah teknik proyeksi yang paling sederhana dimana penduduk diproyeksikan sebagai fungsi dari waktu”, dengan persamaan :

$$P_t = P_0 (1 + r.t)$$

2. Model Geometrik Asumsi dalam model ini adalah penduduk akan bertambah/berkurang pada suatu tingkat pertumbuhan (persentase) yang tetap, dimana proyeksi penduduk dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$P_t = P_0 (1 + r)^t$$

3. Model Eksponensial memiliki asumsi bahwa persentase pertumbuhan penduduk sama setiap hari.

$$P_t = P_0 (2,7182818)^{r.t}$$

Selanjutnya dalam membuat strategi kebijakan harus memperhatikan misi pembangunan nasional. Adapun misi pembangunan nasional adalah mewujudkan

bangsa yang berdaya saing yang mempunyai tiga sasaran pokok yakni meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Penduduk Tumbuh Seimbang. Adapun focus pembangunan penduduk adalah dari sisi kualitas dan kuantitas, Kebijakan pembangunan Kependudukan diletakkan dalam konteks pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencakup pembangunan manusia sebagai subyek maupun obyek, yakni pembangunan yang mencakup seluruh *life cycle approach*.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu mengkaji proyeksi penduduk Kota Tegal untuk digunakan dasar penyusunan kebijakan strategi pemerintahan Kota Tegal. Informan diambil dari pemangku kepentingan seperti BPS, BKKBN, Dinas Pendidikan. Penentuan subyek penelitian dipilih secara purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam/ FGD, observasi, dan dokumentasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Proyeksi dan *Dependency Ratio* Penduduk Kota Tegal

Dengan menggunakan Software Spectrum 5 dari data jumlah penduduk tahun 2018 diproyeksikan jumlah penduduk kota Tegal

tahun 2019-2025. Metode proyeksi menggunakan metode matematik dengan menggunakan data penduduk keseluruhan. Hasil Proyeksi penduduk Kota Tegal diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut (Tabel.1).

Tabel 1. Jumlah Penduduk Tahun 2018 dan Proyeksi Jumlah Penduduk 2019 - 2025
Menurut Jenis Kelamin

Kecamatan	2018		2019		2020		2021	
	Jumlah Penduduk (Jwa)		Proyeksi Jumlah Penduduk (Jwa)					
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Tegal Barat	34026	34035	43127	42009	47254	46070	47200	46000
Tegal Timur	42003	42236	33333	33403	34038	34279	34733	34802
Tegal Selatan	35206	34130	43432	42302	47500	46375	47006	46207
Margadana	33332	30422	33934	33473	42638	42537	40430	42538
Kota Tegal	147435	141464	176376	173849	193803	190264	190009	188403

Kecamatan	2022		2023		2024		2025	
	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jwa)							
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Tegal Barat	43003	42538	38633	38171	38040	38073	33307	33010
Tegal Timur	30894	30774	44403	44000	37960	38100	32103	31671
Tegal Selatan	40414	40200	37800	35932	38433	38474	32860	32833
Margadana	39440	38300	33027	32863	29447	29374	19714	19524
Kota Tegal	176589	173936	151871	148735	124806	122919	90059	86438

Sumber: Disdikapil Kota Tegal dan Hasil Analisis, 2019

Dari Tabel .1. memperlihatkan proyeksi dari data penduduk tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah penduduk tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan mulai menurun tahun 2023. Hal ini dengan mempertimbangkan fertilitas, mortalitas dan migrasi dimasa yang akan datang yang terjadi di suatu daerah. Dari hasil proyeksi jumlah penduduk yang ada, selanjutnya dianalisis proyeksi laju pertumbuhan tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 penduduk dari data dasar tahun 2018. Hasil Proyeksi laju pertumbuhan penduduk Kota Tegal diperoleh hasil perhitungan seperti disajikan dalam Tabel .2.

Tabel.2. Proyeksi Laju PertumbuhanPenduduk Tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022
(Dengan data dasar Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018)

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun (%)			
	2018	2019	2020	2021	2022
Tegal Barat	0.32	21.01	15.07	10.05	9.47
Tegal Timur	6.99	17.90	12.98	8.74	0.41
Tegal Selatan	15.27	21.10	15.15	10.12	5.27
Margadana	29.47	23.34	16.67	9.86	5.79
Kota Tegal	13.84	20.64	14.84	9.64	5.19

Sumber: Hasil Analisis, 2019

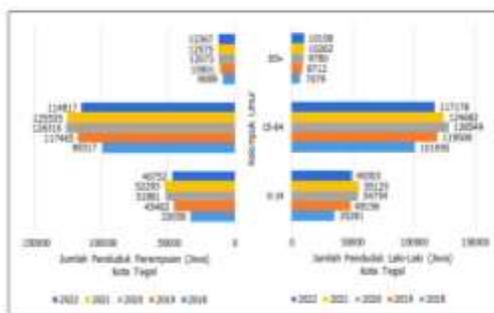
Tabel .2 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk tertinggi pada tahun 2019 dan 2020. Hal ini menunjukkan kenaikan jumlah penduduk mulai terjadi di tahun 2019 dan 2020. Tabel IV.2 memperlihatkan laju pertumbuhan penduduk (2018–2022) tercepat berada di kecamatan Margadana, kemudian Tegal selatan, Tegal Barat dan Tegal Timur. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, seperti sosialisasi tentang Keluarga Berencana lebih ditingkatkan. Selain itu, penggunaan alat-alat kontrasepsi pada wanita usia subur dan sudah menikah juga perlu ditingkatkan.

Rerata rasio pertumbuhan penduduk tahun 2018 sampai dengan 2022 di kecamatan Tegal Barat, yaitu 0.78. Rerata rasio pertumbuhan penduduk tahun 2018 sampai dengan 2022 di kecamatan Tegal Timur, yaitu 0.80. Rerata rasio pertumbuhan penduduk tahun 2018 sampai dengan 2022 di kecamatan Tegal Selatan, yaitu 0.77. Rerata rasio pertumbuhan penduduk tahun 2018 sampai dengan 2022 di kecamatan Margadana, yaitu 0.76. Sedangkan Rerata rasio

pertumbuhan penduduk tahun 2018 sampai dengan 2022 di kota Tegal, yaitu 0.78.

Selanjutnya, dianalisis jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, yaitu 0-4; 5-14; 15-24; 25-49; 50-64; dan >65. Tujuan analisis ini untuk mengetahui jumlah penduduk kelompok produktif dan non-produktif. Selain itu, untuk membantu analisis jumlah penduduk usia sekolah, usia kerja, dan usia lansia. Analisis menggunakan software Spectrum 5 dengan data dasar jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2018. Hasil analisis jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada gambar berikut

I



Gambar 1. Analisis Bonus Demografi Kota Tegal

Secara umum Gambar 1. memperlihatkan bonus demografi di kota Tegal terjadi tahun 2020 dan 2021. Tahun 2018 jumlah penduduk kelompok umur produktif 15-64 sebesar 200412 jiwa, dan diproyeksikan tahun 2019 berjumlah 236973 jiwa, tahun 2020 berjumlah 254859 jiwa, tahun 2021 berjumlah 250217 jiwa, dan tahun 2022 berjumlah 231995 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk kelompok

umur tidak produktif (0-14 dan >65) tahun 2018 sebesar 84507 jiwa, dan diproyeksikan tahun 2019 berjumlah 113252 jiwa, tahun 2020 berjumlah 128488 jiwa, tahun 2021 berjumlah 130255 jiwa, dan tahun 2022 berjumlah 118530 jiwa. Selain itu, Gambar IV.3e juga memperlihatkan jumlah penduduk perempuan berumur >65, lebih banyak daripada penduduk laki-laki.

Dependency ratio atau rasio ketergantungan adalah perbandingan antara banyaknya penduduk yang berusia produktif dengan penduduk yang berusia non produktif. *Dependency ratio* berguna sebagai satu indikator untuk mengukur tingkat perekonomian suatu daerah. Hasil analisis rasio ketergantungan dapat dilihat pada Tabel.3

Tabel. 3 *Dependency Ratio/Rasio Ketergantungan Kota Tegal Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022*

Kecamatan	Dependency Ratio / Rasio Ketergantungan (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Tegal Barat	43.06	48.68	51.28	52.24	51.92
Tegal Timur	41.79	46.84	49.33	50.34	50.20
Tegal Selatan	42.47	48.20	50.87	51.87	51.55
Margadana	41.35	47.61	50.38	54.38	50.86
Kota Tegal	42.17	47.79	50.42	52.06	51.09

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Tabel.3 menunjukkan rasio ketergantungan (*dependency ratio*) pada tahun 2018 sebesar 42.17 %. Hal ini mengindikasikan setiap 100 penduduk usia produktif tahun 2018, harus menanggung 42 penduduk usia non produktif. Menurut proyeksi jumlah penduduk

tahun 2019, rasio ketergantungan sebesar 47.79 %. Hal ini mengindikasikan setiap 100 penduduk usia produktif tahun 2019, harus menanggung 47 penduduk usia non produktif. Sedangkan pada tahun 2020, rasio ketergantungan sebesar 50.42 %. Hal ini mengindikasikan setiap 100 penduduk usia produktif tahun 2020, harus menanggung 50 penduduk usia non produktif. Dan pada tahun 2021, rasio ketergantungan sebesar 52.06 %. Hal ini mengindikasikan setiap 100 penduduk usia produktif tahun 2021, harus menanggung 52 penduduk usia non produktif. Tahun 2020 dan 2021 rasio ketergantungan meningkat karena pada tahun ini penduduk Kota Tegal mengalami kenaikan. Jika tidak diantisipasi oleh pemerintah daerah, hal ini dapat mengakibatkan rasio ketergantungan makin tinggi dan dapat mengakibatkan tingkat kesejahteraan penduduk Kota Tegal menjadi rendah.

4.2. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan

Analisis struktur kualitas penduduk dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan bonus demografi dapat dilihat dari faktor pendidikan, kesehatan dan ketenaga kerjaan.

4.2.1 Pendidikan

Pendidikan yang berkualitas ini bukan hanya untuk menciptakan generasi muda yang produktif dengan kemampuan kognitif saja, namun juga memiliki keterampilan khusus sesuai minat bakat mereka dan memiliki pola berpikir, wawasan, dan kreativitas.

Pertambahan penduduk usia sekolah juga perlu diantisipasi oleh pemerintah Kota Tegal, dengan mempersiapkan sarana dan prasarana

pendidikan yang ada. Apakah memenuhi standar nasional Pendidikan dan memenuhi standar pelayanan minimal sesuai Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana serta Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal pendidikan di Kabupaten/kota. Hasil analisis mencakup jumlah sekolah, jumlah ruang kelas, jumlah guru, dan jumlah rombongan belajar, baik pada tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK. Hasil analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Tegal berdasarkan proyeksi pertumbuhan jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel.4 untuk tingkat SD, Tabel. 5 untuk tingkat SMP dan Tabel.6 untuk tingkat SMA/SMK.

Tabel.4. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Kota Tegal di Tahun Berdasarkan Demografi

Indikator Pendidikan	Standar Pendidikan	2019	Proyeksi		
			2020	2021	2022
Jumlah SD/PA		121	121	121	121
Jumlah Peserta Didik (PD)		20141	21134	22173	22866
Jumlah Ruang Kelas		418	418	418	418
Jumlah Rombongan Belajar (Rombel)		621	621	621	621
Jumlah Guru		1218	1218	1218	1218
Rasio Jumlah PD/Sekolah	1 Sekolah Maks. 2000 PD	149	145	144	139
Rasio Jumlah PD/Ruang Kelas	1 kelas 38 PD	21	24	24	23
Rasio Jumlah PD/Rombel	1 Rombel Maks. 31 PD	22	24	24	23
Rasio Jumlah PD/Guru	1 guru 20 PD	22	27	27	24
Rasio Guru/Sekolah	Mn. 1 guru/rombel dan 1 guru/20 siswa	18	18	18	18
Rasio Rombel/Sekolah	Mn. 1 dan Maks. 24 Rombel/Sekolah	7	7	7	7

Tabel.5. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Tegal di Tahun Bonus Demografi

Indikator Pendidikan	Standar Pendidikan	2018	Proyeksi		
			2020	2021	2023
Jumlah SMP/MTs		22	22	22	22
Jumlah Peserta Didik (PD)		12972	13270	13251	13771
Jumlah Ruang Kelas		401	401	401	401
Jumlah Rombongan Belajar (Rombel)		401	401	401	401
Jumlah Guru		757	757	757	757
Rasio Jumlah PC/Sekolah	1 Sekolah Maks. 2000 PC	302	402	402	387
Rasio Jumlah PC/Ruang Kelas	1 kelas 26 PC	25	27	27	26
Rasio Jumlah PC/Rombel	1 Rombel 26 PC	25	28	27	26
Rasio Jumlah PC/Guru	1 guru/22 PC	25	18	18	17
Rasio Guru/Sekolah	Mn. 4 guru/sekolah (Sd. 1 guru/22 siswa)	32	32	32	31
Rasio Rombel/Sekolah	Mn. 4 dan Maks. 24 Rombel/sekolah	18	18	18	18

Tabel.6. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kelas (SMA/SMK) Kota Tegal di Tahun Bonus Demografi

Indikator Pendidikan	Standar Pendidikan	2018	Proyeksi		
			2020	2021	2023
Jumlah SMA/SMK/MA		22	22	22	22
Jumlah Peserta Didik (PD)		12007	14726	14619	14884
Jumlah Ruang Kelas		561	561	561	561
Jumlah Rombongan Belajar (Rombel)		560	560	560	560
Jumlah Guru		1030	1030	1030	1030
Rasio Jumlah PC/Sekolah	1 Sekolah Maks. 2000 PC	429	466	466	446
Rasio Jumlah PC/Ruang Kelas	1 kelas 26 PC	24	26	26	25
Rasio Jumlah PC/Rombel	1 Rombel 26 PC	24	27	27	26
Rasio Jumlah PC/Guru	1 guru/22 PC	22	18	18	18
Rasio Guru/Sekolah	Mn. 9 guru/sekolah (Sd. 1 guru/22 siswa)	32	32	32	32
Rasio Rombel/Sekolah	Mn. 4 dan Maks. 24 Rombel/sekolah	17	17	17	17

Tabel.4,5 dan 6 menunjukkan kondisi sarana dan prasarana pendidikan baik di tingkat SD, SMP dan SMA/SMK masih memenuhi standar nasional pendidikan dan standar pelayanan minimal. Walaupun jumlah penduduk usia sekolah 7-18 tahun mengalami pertambahan di tahun bonus demografi, tidak diperlukan penambahan baik jumlah sekolah, jumlah ruang kelas, jumlah guru maupun jumlah rombongan belajar di tingkat SD, SMP dan SMA/SMK. Selanjutnya, dianalisis proyeksi jumlah penduduk berdasarkan pendidikan berdasarkan rasio pertambahan penduduk dari data jumlah penduduk tahun 2018. Hasil analisis rasio pertambahan penduduk Kota Tegal di tahun

bonus demografi 2020 dan 2021 dari data jumlah penduduk tahun 2018, yaitu 0.74 dan 0.75. Hasil analisis proyeksi jumlah penduduk berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel 7.

Tabel.7. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Tahun Bonus Demografi 2020 dan 2021 (Dari Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018 Dioduplikasi)

Kelompok	2018	2020	2021
Tidak/Belum Sekolah	66194	89401	88259
Belum Tamat SD/Sederajat	21123	28308	28177
Tamat SD/Sederajat	76675	104620	102631
SMP/Sederajat	42680	57645	56880
SMA/Sederajat	56396	80265	79195
Diploma I/II	777	1050	1036
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	4807	6486	6409
Diploma IV/Strata I	12259	16566	16345
Strata II	705	953	940
Strata III	13	18	17

Tabel 7 menunjukkan proyeksi jumlah penduduk di tahun bonus demografi pada lulusan SMA/ sederajat dan diploma IV/strata I yang tinggi. Tentunya, langkah-langkah pemberdayaan harus disiapkan, agar tidak menjadi pengangguran dan membebani masyarakat. Langkah-langkah tersebut antara lain, bekerjasama dengan para pengguna tenaga kerja dan secara berkala mengadakan bursa kerja (job fair). Selain itu, dinas terkait perlu mengadakan pelatihan UMKM, agar jiwa kewirausahaan dapat dimotivasi. Pemerintah kota bekerjasama dengan perbankan yang ada, mengadakan pelatihan cara mengakses permodalan mikro, agar lulusan SMA/ sederajat dan diploma IV/strata I dapat berwirausaha. Kegiatan ini bertujuan agar para lulusan terdidik, khususnya lulusan diploma IV/strata I dapat menjadi agen pelopor pembuka lapangan kerja di daerah. Dengan langkah-langkah ini diharapkan penduduk terdidik dapat diberdayakan dengan

baik, sehingga menjadi penduduk produktif yang dapat membawa kesejahteraan bagi Kota Tegal

4.2.2 Kesehatan

Keberhasilan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di daerah, akan sangat menentukan keberhasilan daerah dalam memanfaatkan bonus demografi secara optimal. Berbagai program pembangunan kesehatan yang diinisiasi dan diimplementasikan oleh dinas kesehatan setempat, diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi upaya mengoptimalkan periode bonus demografi yang akan datang.

Mengingat urgensi pembangunan kesehatan dalam menentukan keberhasilan memanfaatkan bonus demografi, semua pemangku kepentingan terkait tidak boleh kehilangan momentum pada saat-saat ini untuk mengakselerasi peningkatan gizi masyarakat seoptimal mungkin. Hilangnya momentum untuk mengakselerasi pencapaian dalam bidang nutrisi tersebut pada saat sekarang ini akan menyebabkan ketidakmampuan daerah memanfaatkan bonus demografi secara optimal pada waktunya. Agar dapat memanfaatkan momentum yang ada, maka perlu ditunjang fasilitas kesehatan yang memadai. Jika fasilitas kesehatan dalam hal ini rumah sakit dan puskesmas tidak, maka hasil analisis menunjukkan terjadi kelebihan jumlah pasien dan tidak memenuhi standar yang ada. Standar kesehatan yang tidak terpenuhi, secara hakiki melanggar Hak Asasi Manusia, karena kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap

warga negara. Sesuai dengan Permenkumham No. 34 Tahun 2016 tentang kriteria kota/kabupaten peduli hak asasi manusia, maka 1 puskesmas hanya melayani maksimal 16000 penduduk. Hasil analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah puskesmas dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel.8. Proyeksi Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Puskesmas (jika jumlah puskesmas mengikuti Tabel V.5a)

Kecamatan	Proyeksi Rasio		
	2020	2021	2022
Tegal Barat	46964	46963	42780
Tegal Timur	54644	54778	50729
Tegal Selatan	46679	47002	42840
Margadana	43088	43091	38914
Kota Tegal	47919	47958	43816

Tabel.8 menunjukkan terjadi kelebihan pasien yang ditangani tiap puskesmas yang ada di Kota Tegal. Kelebihan pasien sekitar 3 kali lipat dari standar pelayanan sesuai hak asasi manusia. Sedangkan hasil analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah rumah sakit (jika jumlah rumah sakit mengikuti Tabel V.5a) dapat dilihat pada Tabel. 9

Tabel.9. Proyeksi Rasio Jumlah Penduduk Terhadap 4 Rumah Sakit (jika jumlah rumah sakit mengikuti Tabel V.5a)

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk Terhadap 4 Rumah Sakit
2017	248084	62024
2018	284919	71230
2019	350225	87536
2020	383347	95837
2021	388472	95118
2022	350525	87631

Tabel.9 menunjukkan di tahun bonus demografi 1 rumah sakit yang ada di Kota Tegal, diproyeksikan akan menangani 95837 jiwa di tahun 2020 dan 95118 jiwa di tahun 2021. Hal ini meningkat 35% jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2017. Hal ini membuat pelayanan rumah sakit terhadap pasien menjadi berkurang dan dikhawatirkan akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penambahan jumlah puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat 1 di masyarakat. Hasil analisis jumlah puskesmas yang dibutuhkan, disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk di tahun bonus demografi dapat dilihat di Tabel. 10

Tabel.9. Proyeksi Rasio Jumlah Penduduk Terhadap 4 Rumah Sakit
(jika jumlah rumah sakit mengikuti Tabel V.5a)

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk Terhadap 4 Rumah Sakit
2017	248094	62024
2018	284919	71230
2019	350225	87556
2020	380347	95837
2021	380472	95118
2022	350525	87631

Tabel. 10 menunjukkan dengan penambahan jumlah puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat I pada tiap kecamatan, maka akan membuat rasio jumlah penduduk terhadap puskesmas sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sesuai dengan hak asasi manusia. Penambahan puskesmas ini bertujuan mencapai keluarga sehat dan memiliki

kecukupan gizi serta memiliki nilai produktif di masa depan, maka kebijakan dan program pembangunan kesehatan harus bertumpu pada pendekatan preventif dan promotif sebagai pilar utama. Keberhasilan mengimplementasikan pendekatan preventif dan promotif secara tepat akan menyelamatkan sumber daya keuangan yang sangat besar, sehingga sumber daya tersebut dapat dialihkan kepada tujuan-tujuan yang lebih produktif.

GERMAS dicirikan antara lain oleh penekanan yang kuat pada kerjasama multisektor, keseimbangan masyarakat antara keluarga dan individu, serta pembedayaan masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang hendak disasar, gerakan ini difokuskan pada tiga aktivitas utama, yaitu: 1) meningkatkan aktivitas fisik; 2) konsumsi sayur dan buah, serta 3) deteksi dini penyakit tidak menular (PTM). Upaya pencapaian Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini harus dibangun di atas fondasi pembangunan gizi untuk semua lapisan masyarakat. Pembangunan gizi yang berhasil bertumpu pada ketersediaan dan ketahanan pangan, serta akses ke sumber pangan tersebut secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Peran kemitraan yang kokoh dan melibatkan para pemangku kepentingan multi-sektor sangat menentukan keberhasilan investasi pada pembangunan gizi. Karena sifat pembangunan gizi yang lintas-sektor dan mencakup berbagai aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam masyarakat diperlukan pendekatan holistic untuk menanggulangi

permasalahan gizi buruk. Oleh karena itu diperlukan jumlah posyandu yang memadai, untuk dapat melayani balita (bayi lima tahun), agar permasalahan gizi dapat diantisipasi. Jumlah posyandu di Kota Tegal berjumlah 202 dan tersebar di 4 kecamatan (Tabel V.5a). Hasil analisis menunjukkan terjadi kelebihan jumlah balita yang ditangani tiap 1 posyandu. Standar pelayanan menyatakan tiap 1 posyandu melayani maksimal 50 balita. Hasil identifikasi jumlah penduduk balita berumur 0-5 tahun dan rasio jumlah penduduk balita terhadap posyandu (jika jumlah posyandu sama dengan Tabel .11 dapat dilihat pada

Tabel.11. Proyeksi Jumlah Penduduk 0-5 Tahun dan Rasio Jumlah Penduduk 0-5 Tahun Terhadap Jumlah Posyandu di Tahun Bonus Demografi (jika jumlah Posyandu mengikuti Tabel V.5a)

Kecamatan	2018		2020		2021	
	Jumlah Penduduk 0-5	Rasio Terhadap Jumlah Posyandu	Proyeksi Jumlah Penduduk 0-5	Rasio Terhadap Jumlah Posyandu	Proyeksi Jumlah Penduduk 0-5	Rasio Terhadap Jumlah Posyandu
Tegal Barat	6419	111	11328	195	11825	204
Tegal Timur	7501	129	12841	221	13549	234
Tegal Selatan	6718	143	11597	247	12066	257
Margadana	5735	148	10787	277	11328	290
Kota Tegal	26393	131	46553	230	48768	241

Tabel 11 menunjukkan terjadi kelebihan 2-3 kali lipat jumlah penduduk usia 0-5 tahun atau balita yang ditangani oleh 1 posyandu. Hal ini melebihi standar pelayanan dimana 1 posyandu hanya melayani 50 balita. Hal ini dikhawatirkan memiliki dampak buruk jangka panjang dari permasalahan gizi buruk dan pola hidup yang tidak sehat. Karena peran posyandu sebagai

fasilitas pelayanan bagi balita bekerja tidak optimal untuk melayani keluarga maupun masyarakat. Pelayanan yang tidak optimal akan menimbulkan kerugian yang nantinya akan dipikul sangat besar akibat gizi buruk dan pola hidup tidak sehat. Posyandu berperan dalam mendorong masyarakat untuk mengadopsi pola hidup yang sehat dan menerapkan pedoman gizi seimbang secara optimal, khususnya terhadap balita. Oleh karena itu, diperlukan penambahan jumlah posyandu agar pelayanan kepada masyarakat menjadi optimal. Hasil analisis jumlah posyandu yang dibutuhkan, disesuaikan dengan proyeksi jumlah penduduk di tahun bonus demografi dapat dilihat di Tabel .12.

Tabel.12. Jumlah Posyandu Yang Dibutuhkan, disesuaikan dengan Proyeksi Jumlah Penduduk di Tahun Bonus Demografi (Standar pelayanan 1 posyandu melayani 50 penduduk usia 0-5 tahun)

Kecamatan	2018		2020		2021	
	Jumlah Posyandu	Rasio	Jumlah Posyandu	Rasio	Jumlah Posyandu	Rasio
Tegal Barat	58	111	225	50,35	225	50,32
Tegal Timur	58	129	260	49,39	270	50,18
Tegal Selatan	47	143	230	50,42	240	50,28
Margadana	39	148	215	50,17	225	50,25
Kota Tegal	202	131	930	50,06	970	50,28

Tabel.12 menunjukkan dengan penambahan jumlah posyandu sebagai fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat dan balita dalam hal panduan gizi dan pola hidup sehat pada tiap kecamatan, maka akan membuat rasio jumlah penduduk terhadap posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sesuai

dengan hak asasi manusia. Di samping itu, pendidikan memainkan peran sentral dalam upaya peningkatan gizi masyarakat. Pengenalan dan kesadaran akan pola konsumsi yang sehat perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat setempat. Inilah peran sentral posyandu sebagai fasilitas yang dapat memonitori pola hidup sehat di masyarakat, baik di tingkat akar rumput maupun di kalangan yang lebih mampu secara ekonomi, mengenal apa itu pola hidup sehat dan pedoman gizi seimbang. Selain penambahan fasilitas kesehatan, tentunya harus diikuti jumlah tenaga kesehatan yang memadai. Jumlah tenaga kesehatan dapat dilihat pada Tabel .13.

Tabel.13. Tenaga Kesehatan di Kota Tegal
(Data Tahun 2015 dan Buku Tegal Dalam Angka Tahun 2018)

Kecamatan	Tenaga Medis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Lainnya
Tegal Barat	63	130	53	25	16
Tegal Timur	5	25	32	2	17
Tegal Selatan	126	749	149	130	110
Mangadana	5	24	13	5	13
Kota Tegal	199	928	247	162	156

Jika jumlah tenaga kesehatan sama dengan data pada Tabel.13, maka pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak optimal. Pelayanan yang tidak optimal dapat mengakibatkan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Hasil analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah tenaga kesehatan (jika jumlah tenaga kesehatan mengikuti Tabel V.5b) dapat dilihat pada Tabel .14.

Tabel.14. Proyeksi Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Tenaga Kesehatan di Tahun Bonus Demografi
(jika jumlah tenaga kesehatan mengikuti Tabel V.5b)

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	Rasio Tenaga Medis	Rasio Tenaga Keperawatan	Rasio Tenaga Kebidanan	Rasio Tenaga Kefarmasian	Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya
2015	24919	142	37	124	179	105
2020	30347	195	43	152	236	147
2021	30472	192	43	154	239	148
2022	30625	176	37	149	214	127
Standar Pelayanan		2500	855	1000		

Standar pelayanan yang diatur tentang jumlah tenaga kesehatan hanya tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kebidanan. Dimana standar pelayanan yang sesuai hak asasi manusia menyebutkan 1 tenaga medis melayani 2500 jiwa penduduk, 1 tenaga keperawatan melayani 855 jiwa penduduk, dan 1 tenaga kebidanan melayani 1000 jiwa penduduk. Oleh karena itu, Tabel .14 menunjukkan Kota Tegal kekurangan tenaga kebidanan untuk melayani lonjakan penduduk di tahun bonus demografi. Sedangkan tenaga media dan tenaga keperawatan, masih memenuhi standar pelayanan. Hasil analisis menunjukkan diperlukan minimal 380 tenaga kebidanan untuk melayani proyeksi jumlah penduduk di tahun bonus demografi, yakni tahun 2020 dan 2021, agar 1 tenaga kebidanan melayani hanya 1000 jiwa penduduk.

4.2.3. Ketenagakerjaan

Fenomena transisi demografi diyakini erat kaitannya dengan produktivitas tenaga kerja. Menurut hasil survei sosial ekonomi nasional (susenas) oleh BPS tahun 2018 di Kota Tegal menunjukkan tren positif di mana penduduk usia

produktif (15-64 tahun) di tahun 2018 mencapai 69.95% dari jumlah total penduduk yang mencapai 248779 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Tegal memiliki bonus demografi yang bertolak ukur pada skema dasar tatanan ketenagakerjaan yang kini menjadi landasan sukses atau tidaknya suatu daerah. Dalam memulai suatu tatanan ketenagakerjaan membutuhkan sistem pendidikan yang berkualitas untuk mencetak usia produktif menjadi tenaga kerja yang handal. Sistem pendidikan memiliki kemutlakan dalam berperan penting demi memaksimalkan bonus demografi yang dimiliki Kota Tegal.

Kota Tegal diperkirakan mencapai puncak "bonus demografi" pada tahun 2020 sampai 2021. Bonus demografi ini akan membawa dampak sosial-ekonomi. Hasil analisis proyeksi data ketenagakerjaan pada tahun bonus demografi disajikan pada Tabel .15.

Tabel.15. Komposisi Angkatan Kerja Kota Tegal

Kelompok Umur	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja			Jumlah
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
15-64	109820	9806		16545	33785	4389	
>65	3942	0		0	9356	1756	
Tegal	113762	9806	123568	16545	43141	6145	189399

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik Tahun 2018

Proyeksi pada Tabel.15 menunjukkan terdapat 27.82% pada tahun 2020 dan 28.23% pada tahun 2021. Dari hasil analisis memperlihatkan dengan Meningkatnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari

sisi pembangunan. Akibatnya, terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, keuntungan ini dapat berbalik menjadi musibah apabila daerah minim melakukan investasi sumber daya manusia (human capital investment) melalui sistem pendidikan yang berkualitas. Masalah yang paling nyata terkait pemanfaatan bonus demografi dan ketenagakerjaan adalah ketersediaan lapangan pekerjaan dan persebaran, serta kualitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk bersaing di dunia kerja maupun pasar internasional. Ketiga masalah tersebut harus menjadi perhatian dan antisipasi pemerintah daerah melalui berbagai program kerjanya.

5. KESIMPULAN

Dari hasil proyeksi jumlah penduduk Kota Tegal masuk tahun bonus demografi pada tahun 2020 dengan rasio ketergantungan sebesar 50.42 % dan tahun 2021 dengan rasio ketergantungan sebesar 52.06 %. Kebijakan dan program yang dilakukan melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Program Generasi Berencana, Pendidikan kependudukan yang ditujukan untuk mengubah pola pikir masyarakat dan meningkatnya kesadaran mengenai isu kependudukan, Pendidikan keterampilan merupakan salah satu jalur meningkatkan kualitas SDM dan mampu menghasilkan SDM unggul yang siap bekerja.

Terkait dengan tatanan ketenagakerjaan pemberdayaan tenaga kerja dilakukan dengan melatih wirausaha, akses permodalan dan

pelatihan UMKM. Selain itu, kebijakan lainnya adalah pengembangan usaha sektor informal di daerah-daerah, seperti pengembangan usaha-usaha kerajinan local dan UMKM.

Projections: Methodology and Analysis. New York. Kluwer Academic/ Plenum Publishers

Tilaar dan Riant Nugroho.(2008). Kebijakan Pendidikan, Pustaka Pelajar ,Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S.M. (2015). *Pengelolaan Bonus Demografi Guna Meningkatkan Daya Saing Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional*. Materi dalam FGD Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhamnas RI Direktorat Pengkaji
- Awan Y Abdoellah dan Yudi Rusfiana. (2016), *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabetaan Sosial Budaya. Jakarta
- Edwards III, George C. (2003). *Implementing Public Policy*. Jakarta
- Faturochman, (2001), *Reorientasi Kebijakan Kependudukan*, Adytya Media, Yogyakarta
- Hatmadji, Sri Harijati (1981) "Fertilitas" dalam *Dasar-Dasar Demografi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Klosterman, Richard E. (1990). *Community Analysis and Planning Techniques*. Savage. Rowman & Littlefield, c1990
- Mardiyah, S. (2001). *Konsep Indeks Pembangunan Manusia, Tiga Dimensi Pokok Pembangunan Manusia*. Surabaya: Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur
- Nugroho, Riant. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Rusli, S., Toersilaningsih, R., Meirida, D., Kurniawan, U. K., & Setiawan, K. D. (2015). *Potensi dan Implikasi Bonus Demografi di Provinsi Banten Tahun 2015-2035*. Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN
- Smith, Stanley , Jeff, Tayman, and David, Swanson. (2001). *State and Local Population*